



RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA PEKALONGAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen renja ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Pekalongan yang disertai indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif. Selanjutnya, Renja akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2024 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 09 Agustus 2023

Kepala Bappeda Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ivv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3 Program dan Kegiatan	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Catatan Penting	69
5.2 Kaidah Pelaksanaan	69
5.3 Rencana Tindak lanjut	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023.....	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 Target Dan Proyeksi Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	32
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pekalongan.....	36
Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	51
Tabel 3.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	52
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025	57
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Rentra Perangkat Daerah pada tahun n.
- b. Selanjutnya rancangan awal renja disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik menjadi Rancangan Renja, yang disusun sebagai pembahasan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
- c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, *buttom up*, *top down*, dan *politis*.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keunagan daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Pekalongan;
24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi BAPPEDA Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja Bappeda, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Bappeda Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selaian itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pekalongan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 7.057.094.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.654.580.097,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,30%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 7.641.959.000,- (belanja gaji dan tunjangan 4.236.515.000,-) melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Kemampuan sumber daya manusia perencana dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kurang optimal;
3. Koordinasi antar *stake holder* perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

4. Pemahaman tentang *output* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan dan sub kegiatan belum terdefinisi secara utuh, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *output* kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2), dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Dari 4 Program termasuk program rutin dengan 12 (dua belas) indikator kinerja outcome/hasil, terdapat 10 (sepuluh) indikator tercapai sesuai target dan 2 indikator melebihi target, Sedangkan untuk kegiatan, terdapat 15 (lima belas) kegiatan dengan 15 (lima belas) indikator, dan terdapat 33(tiga puluh tiga) subkegiatan sesuai target yang sudah direncanakan. Adapun evaluasi kinerja hasil/ keluaran program/kegiatan/ subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada pelaksanaan renja tahun lalu (n-2) atau Tahun 2022, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Indikator Program/kegiatan renja Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan ada 10 (sepuluh) indikator program, 15 (tiga belas) indikator kegiatan dan 54 (lima puluh empat) indikator subkegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Realisasi indikator program yang melebihi target kinerja yang direncanakan ada 2 (dua) indikator. Sedangkan realisasi indikator sub kegiatan yang melebihi target kinerja ada 2 (dua) sub kegiatan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Indikator program/kegiatan/sub kegiatan tidak ada yang tidak tercapai targetnya
Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan sesuai dengan perencanaan, yaitu adanya kesesuaian target kinerja dengan anggaran yang ditetapkan; kinerja masing-masing pelaksanaan kegiatan yang baik, dengan memperhatikan waktu dan anggaran yang sudah ada; koordinasi yang baik dengan instansi terkait, baik instansi vertikal, provinsi maupun OPD di Kota pekalongan.
Adapun faktor-faktor melebihi target kinerja pada kegiatan, disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan jumlah anggaran yang direncanakan dapat meningkatkan kinerja yang ditentukan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Target kinerja program/kegiatan/subkegiatan terpenuhi sesuai target dan bahkan ada yang melebihi target, sehingga tidak ada implikasi yang dapat timbul terhadap target renstra pada tahun akhir periode.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan yang sudah dilakukan maping berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PEKALONGAN**

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
5	URUSAN PENUNJANG									
5.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	40
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	40
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	10 dokumen	40
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	14 kali	14 kali	33,3
		Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	-	12	20
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
	Akhir Tahun SKPD									
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	15	-	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	13
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12	24 bl	40
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 unit	3 unit	6 unit	7 unit	116,67	6 unit	13 unit	87

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	-	-	-	-	-	20 unit	20 unit	100
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	55 bl	11 bl	11 bl	11 bl	100	11 bl	22 bl	40
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
5.01.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	547 org/kali	115 org/kali	228 org/kali	370 org/kali	182,28	177 org/kali	547 org/kali	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Daerah								
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	75 unit	15 unit	14 unit	14 unit	100	-	14	19
		Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	-	-	-	12 bl	12 bl	-
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	24 bl	40
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	100%	100
		Jumlah dokumen RKPD yang disusun	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	40
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Persentase pelaksanaan analisis data	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	melalui forum satu data								
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	40
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	40
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan Bidang Pemsosbud	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	25
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	10 kali	-	2 kali	2 kali	100	2 kali	4 kali	40
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang pemerintahan yang disusun	5 dokumrn	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Jumlah dokumen LP2KD yang disusun	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	2 dokumen	40
		Jumlah dokume RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20
		Jumlah dokumen pelaksanaan Penanggulangan masalah gizi yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia	5 kali	-	1 kali	1 kali	100	1	2	40
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Anggaran Responsif Anak (ARA) Kota Pekalongan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1	20

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	2	40
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1	50
		Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1	20
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pendukung pengembangan Teknopark	3 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Kota Pekalongan dengan Penekanan pada Pengembangan Sektor Perikanan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan sektor SDA yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.01.03.2.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Jumlah dokumen kajian Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Onshore yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen model peremajaan/revitalisasi kawasan kumuh yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
5.01.03.2.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen evaluasi implementasi Perda RTRW 2009-2029 yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen koordinasi pengembangan wilayah yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20
		Jumlah dokumen revisi masterplan smart city yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
		Jumlah laporan evaluasi smart city yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20
		Jumlah dokumen/laporan koordinasi penataan ruang yang disusun	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	72	-	72	76,6	106,38	73	76.6	100,8
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100%	3 riset	100%	100%	100	100%	100%	100
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan Pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi	30 riset	5 riset	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan	5 riset	-	5 riset	5 riset	100	5 riset	10 riset	40
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
		Jumlah website kelitbangan yang dikelola	2 wibesite	1 jurnal	2 wibesite	2 website	100	2 wibesite	2 wibesite	100
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa)	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	6 kali	40
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	40
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	20 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	8 kali	40
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100	-	4 kali	20

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
	Inovasi									
		Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional	5 event	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	20
		Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi	5 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	20
		Jumlah Pemenang Krenova	20 pemenang	5 pemenang	5 pemenang	5 pemenang	100	2 pemenag	7 pemenang	35
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

1. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan adalah:

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- 2) perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 3) perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
- 7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 8) pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 9) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- 10) pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- f. Bidang penelitian dan pengembangan
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kondisi Sumber Daya Manusia
- Jumlah pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan, sampai dengan Juni 2023 berjumlah 31 orang.
- a. Jumlah pegawai BAPPEDA berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dari pegawai yang berstatus PNS adalah sebagai berikut:
 - 1) 10 (sepuluh) orang berpendidikan S 2;
 - 2) 19 (sembilan belas) orang berpendidikan S 1/D IV;
 - 3) 2 (dua) orang berpendidikan D III;
 - 4) 1 (satu) orang berpendidikan setingkat SMA;
 - 5) 1 (satu) orang berpendidikan SMP.
 - b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktural
 - a) Eselon II.b : 1 orang
 - b) Eselon III.a : 1 orang
 - c) Eselon III.b : 4 orang
 - d) Eselon IV.a : 2 orang
 - 2) Pejabat fungsional subkoordinator : 5 orang
 - 3) Staf : 12 orang
 - 4) Pejabat Fungsional : 8 orang
 - c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang
 - 2) Pembina Tk.I (IV/b) : 2 orang
 - 3) Pembina (IV/a) : 6 orang
 - 4) Penata Tingkat I (III/d) : 3 orang
 - 5) Penata (III/c) : 2 orang
 - 6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 5 orang
 - 7) Penata Muda (III/a) : 9 orang
 - 8) Penata Tk I (IIId) : 0 orang
 - 9) Pengatur (II/c) : 1 orang
 - 10) Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
4. Kondisi Sarana dan Prasarana
- Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:
- a. Mobil Dinas : 2 unit
 - b. Motor Dinas : 12 unit
 - c. PC. Unit : 25 unit

d. Laptop/laptop	:	30 unit
e. LCD	:	6 unit
f. Drone	:	1 unit
g. Voice recorder	:	2 unit
h. GPS Garmin	:	2 buah
i. Camera	:	2 buah
j. AC	:	14 unit
k. Ruang Kerja	:	15 ruang
l. Ruang Rapat	:	2 ruang
m. Gudang	:	1 ruang

Sarana prasana untuk Sekretariat pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja kerja	:	13 buah
b. Lemari	:	8 buah
c. Kursi	:	13 buah
d. Filling cabinet	:	10 unit
e. Kipas angin	:	1 unit
f. Televisi 55"	:	2 unit
g. Printer/scener	:	8 unit
h. Mesin ketik	:	1 unit

Sarana prasana untuk Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja kerja	:	7 buah
b. Lemari	:	2 buah
c. Kursi	:	10 buah
d. Filling cabinet	:	3 buah
e. Printer scener	:	4 buah
f. Mesin ketik	:	1 buah

Sarana prasarana di Ruang Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja kerja	:	5 buah
b. Lemari	:	4 buah
c. Kursi	:	8 buah
d. Filling cabinet	:	2 buah
e. Printer	:	2 buah
f. Mesin ketik	:	buah

Sarana prasarana di Bidang Perekonomian, sumberdaya alam, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja kerja	:	buah
b. Lemari	:	5 buah
c. Kursi	:	10 buah
d. Filling cabinet	:	8 buah

- e. Kipas angin : 1 buah
- f. Printer/scener : 3 buah
- g. Mesin ketik : 1 buah

Sarana prasarana di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Meja kerja : 9 buah
- b. Lemari : 3 buah
- c. Kursi : 13 buah
- d. Filling cabinet : 3 buah
- e. Printer/scemer : 5 buah
- f. Mesin ketik : 3 buah

Sarana prasarana di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Meja kerja : 2 buah
- b. Lemari : 1 buah
- c. Kursi : 4 buah
- d. Filling cabinet : 1 buah

5. Permasalahan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagian saja usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Kecilnya realisasi dari usulan tersebut disebabkan keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan penentuan skala prioritas dan kebijakan yang ada.

Menurut Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021, Bappeda merupakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan perwal tersebut, Bappeda mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Pada Tahun 2022, Bappeda melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan yaitu urusan perencanaan pembanguann dan urusan penelitian dan pengembangan, 4 program, 14 kegiatan dan 33 subkegiatan dengan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

a) Nilai SAKIP OPD

Penilaian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Berdasarkan

penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat, Bappeda mendapat nilai 88,10 dari target 88,0 atau ketercapaiannya 100,11%

b) Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD

Tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 99,19 dari target 100% tercapai 99,19%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD.

c) Persentase laporan hasil litbang

Indikator ini dicapai oleh program litbang, dengan ketercapaian 100 % yaitu dari target 100% tercapai 100%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022
Target Dan Proyeksi Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan									
1	Nilai SAKIP OPD			88	89	90	88,10	89	90	indeks
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD			100	100	100	99,19	100	100	persen
3	Persentase laporan hasil litbang			100	100	100	100	100	100	persen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewajiban daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan penelitian dan pengembangan daerah menghadapi beberapa tantangan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan dinamika persoalan yang lain yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan permasalahan umum yang ada dalam penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Desentralisasi pemerintahan dan pembangunan

Tuntutan masyarakat terhadap makna riil desentralisasi pemerintahan dan pembangunan (otonomi daerah) bagi kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan publik masih terus bergulir. Kebijakan perencanaan daerah masih dihadapkan pada kebutuhan riil untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan publik sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.

2. Kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan

Kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompeten dan juga pihak-pihak yang peduli kepada pembangunan daerah masih diperlukan dan diharapkan bukan hanya memunculkan sinergi dalam mengupayakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi sekaligus membangun *social trust* dan kepemilikan bersama atas proses pembangunan, serta saling mengisi akan kekurangan kelebihan masing-masing pihak.

3. Perluasan tuntutan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah

Masih adanya gerakan demokratisasi, tuntutan partisipasi publik dalam proses pembangunan sehingga agenda perencanaan pembangunan masih dihadapkan pada tantangan mengenai bagaimana mengembangkan metode dan mekanisme partisipasi publik yang efektif dan terarah dalam proses perencanaan pembangunan, tanpa mengorbankan dimensi demokratisasi. Dilema yang selalu muncul dalam mengembangkan partisipasi publik dalam pembangunan adalah bahwa tuntutan efektivitas tidak selalu sejalan dengan kebutuhan demokrasi dan partisipasi masyarakat.

4. Pluralitas aspirasi dan kebutuhan masyarakat

Penyelarasan kebijakan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masih diperlukan. Dalam masyarakat yang heterogen dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi, keputusan memilih suatu keputusan akan menjadi hal yang tidak mudah, tetapi secara tak terhindarkan harus dilakukan. Karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan pola dan sistem yang pengambilan keputusan jelas dan terukur untuk menentukan pemihakan dan pilihan aspirasi segmen masyarakat akan menjadi salah satu isu strategis yang dihadapi institusi perencana.

5. Perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kebijakan daerah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sedikit banyak mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

6. Kurangnya basis data sebagai bahan penyusunan perencanaan

Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap perangkat daerah untuk menunjang proses perencanaan, baik untuk tingkat kota maupun di masing masing perangkat daerah.

Permasalahan spesifik yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam setiap pengambilan kebijakan sangat diperlukan adanya data dan informasi yang valid, akurat dan *up to date*, sehingga dalam suatu proses akan mudah untuk mengidentifikasi suatu masalah. Dengan keakuratan data dan informasi yang terus menerus diharapkan akan menghasilkan suatu *output* yang tepat. Kurang validnya data dan informasi sering mengakibatkan pengambilan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Adapun permasalahan lain yang ada di Bappeda dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, antara lain :

1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang sinergis dan terintegrasi

Kebutuhan dokumen perencanaan pendukung masih sangat dibutuhkan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan yang tepat dan terukur. Dokumen tersebut baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu karena faktor keterbatasan jumlah personil perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan pembangunan daerah.

2. Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang dikarenakan kurang spesifiknya indikator kinerja, sehingga evaluasi kinerja dan pelaporan yang belum konsisten. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) yang merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan Monitoring dan Evaluasi dapat lebih efektif.

Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan, diantaranya adalah:

1. Inovasi dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis serta tugas tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD 2021-2026.

4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat dengan fasilitasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pekalongan**

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	6.463.227	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	5.764.516		
								persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			
								persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%			
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>318.906</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>15.366</i>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	2.717	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.972		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.630	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.394	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	314.559	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12.000	
			Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	4 dokumen							
			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen							
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen							
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase ketercapaian administrasi	100%	5.572.053	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase ketercapaian administrasi	100%	5.031.088	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keuangan perangkat daerah					keuangan perangkat daerah			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali	5.526.989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/bulan	4.984.196	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi Keuangan	12 bulan	43.530	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	45.600	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.534	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.292	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	8.631	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	2 kali	8.631	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 kali	5.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	331.969	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	436.756	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.357	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	1.700	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda benda pos	12 bulan	59.203	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	85.512	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 unit							
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	2.716	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.914	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	48.878	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	55.473	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.577	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	13.577	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan	12 bulan	2.580	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.580	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	115 orang/kali	203.658	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 laporan	275.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	154.483	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	166.406.	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.362	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.362	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	66.942	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	75.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	85.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	90.044	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	78.360	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	109.900	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasiona	12 bulan	57.918	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	84.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.442	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	25.200	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	727.715	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	Persentase penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	581.954	
								Persentase penyediaan data informasi yang berkualitas dan tepat waktu	100%		
								Persentase penyediaan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%		
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%	609.354	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%	489.424	
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah dokumen rancangan teknokratik RPJMD yang disusun	1 dokumen	609.354	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	35 dokumen	489.424	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen RKPD yang disusun	3 dokumen		Daerah Kabupaten/ Kota					
			Jumlah dokumen RPJPD yang disusun	1 dokumen							
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100%	106.550	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100%	17.200	
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun	1 dokumen	106.550	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	17.200	
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	11.811	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	75.330	
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala		Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	4 dokumen	11.811	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 laporan	75.330	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	4 dokumen		Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100%	863.157	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100%	586.389	
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Perekonomian								100%			
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah								100%			
10	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan</i>	<i>100%</i>	<i>198.645</i>	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan</i>	<i>100%</i>	<i>187.172</i>	
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	2 kali	8.688	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 laporan	11.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun	1 dokumen	69.506	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	45.000	
			Jumlah dokumen LP2KD yang disusun	1 dokumen							
			Jumlah dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	1 dokumen							
			Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan yang disusun	1 dokumen							
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun	1 dokumen	26.064	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen pelaksanaan penanggulangan masalah gizi yang disusun	1 dokumen		Pembangunan Manusia					
			Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia	1 kali							
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen Anggaran Responsif Anak (ARA) Kota Pekalongan	1 dokumen	94.387	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	101.172	
			Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan	1 dokumen							
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	1 dokumen							
11	Koordinasi Perencanaan Bidang	Bappeda	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev	100%	255.664	Koordinasi Perencanaan Bidang	Bappeda	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev	100%	52.657	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan			Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan			
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Teknopark (SIDa)	1 dokumen	255.664	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	52.657	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun (SIDa)	1 dokumen							
			Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan teknopark (SIDa)	5 kali							
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	408.848	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	346.560	
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan		Jumlah dokumen koordinasi infrastruktur yang disusun	1 dokumen	199.881	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 laporan	167.550	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					DaerahBidang Infrastruktur					
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Kewilayahan		Jumlah dokumen evaluasi smart city	1 dokumen	208.967	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan	179.010	
Jumlah dokumen koordinasi pengembangan wilayah			1 dokumen								
Jumlah dokumen/laporan koordinasi penataan ruang yang disusun			1 dokumen								
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100%	1.248.015.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	734.855	
								Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	73		
								Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbang	100 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan</i>	<i>100%</i>	<i>255.433</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan</i>	<i>100%</i>	<i>267.940</i>	
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau Lembaga penelitian yang difasilitasi (SIDa)	6 riset	178.076	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 laporan	173.720	
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	1 jurnal	77.357	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Bai	1 laporan	94.220	
			Jumlah website kelitbangan yang dikelola (SIDa)	1 website							
			Skor Capaian Nilai RIDA (SIDa)	74 skor							
14	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan</i>	<i>100%</i>	<i>298.826</i>	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Bappeda</i>	<i>Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan</i>	<i>100%</i>	<i>313.725</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bidang aspek aspek sosial					bidang aspek aspek sosial			
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial		Jumlah FGD/workshop /Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa)	3 kali	298.826	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen	313.725	
			Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)	1 riset							
			Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	4 kali							
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100%	693.756	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100%	153.190	
33	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa)	1 event	693.756	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	141.690	
			Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa)	1 kali							
			Jumlah Pemenang Krenova non ekraf (SIDa)	4 pemenang							
			Jumlah Rakor tim Koordinasi	1 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan SIDA (forum Penta Helix)								
			Jumlah Rapat Paripurna dan Pokja Penguatan SIDA yang dilaksanakan (SIDa)	3 kali							
34						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	11.500	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana kerja (renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja Bappeda tahun 2024 sesuai dengan RKPD 2024, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2024, Renja Bappeda Tahun 2024 juga berpedoman pada RKP Tahun 2024, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi: 1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 4. Penguatan daya saing usaha; 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; 7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sesuai RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 ditujukan untuk **“Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian”**.

Adapun Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2024. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
			infratraktur yang merata dan berkualitas	4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
				9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
				3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
				5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
					dan inklusif bagi anak
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	3	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
				7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
				12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				

Sumber : RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024

Keterkaitan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pekalongan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, dimana terdapat 6 Program/Proyek di Kota Pekalongan yaitu :

- a. Pengendalian Banjir Sistem S. Loji/ Pekalongan/Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
- b. Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
- c. Pengendalian Banjir dan Rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang;
- d. Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;

- e. Pengembangan TOD (Transit Oriented Development) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan;
- f. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2024 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota periode 2021-2026 yang arah kebijakannya sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Selain itu Rencana Strategis Bappeda yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja juga sudah disusun untuk jangka waktu 2021-2026. Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengacu pada RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan makro selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran perangkat daerah, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Dalam kaitannya dengan penetapan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2024, maka kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung secara langsung dalam prioritas daerah yang pertama, yaitu Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel serta terjaganya kondusivitas wilayah.

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan yang ditetapkan adalah ***meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah, serta meningkatkan kualitas kelitbang untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan*** dengan sasaran ***meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan meningkatnya rekomendasi hasil litbang***, sehingga BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif yang efektif dan efisien.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
4. Sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2024, BAPPEDA Kota Pekalongan merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 4 Program yang terdiri 15 kegiatan dengan 34 sub kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024, tercantum dalam tabel 3.2. sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BAPPEDA				7.667.714.000			9.257.312.000
A	Urusan Perencanaan Pembangunan				6.932.859.000	APBD II APBD I		8.049.867.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kota Pekalongan	100 persen	5.764.516.000	APBD II	100 persen	6.517.344.000
		persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen			100 persen	
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah		100 persen			100 persen	
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	100 persen	15.366.000	APBD II	100 persen	326.142.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota pekalongan	2 dokumen	1.972.000	APBD II	2 dokumen	10.576.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.394.000	APBD II	2 dokumen	1.623.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota pekalongan	4 laporan	12.000.000	APBD II	2 dokumen	313.943.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	5.031.088.000	APBD II	100 persen	5.624.180.000
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang	Kota pekalongan	4 org/Bulan	4.984.196.000	APBD II	14 Org/Bulan	5.580.844.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
5	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota pekalongan	12 dokumen	45.600.000	APBD II	12 dokumen	41.860.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota pekalongan	1 laporan	1.292.000	APBD II	1 dokumen	1.476.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota pekalongan	100 persen	5.000.000	APBD II	100 persen	8.510.000
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota pekalongan	2 paket	5.000.000	APBD II	2 paket	8.510.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	436.756.000	APBD II	100 persen	327.303.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota pekalongan	12 paket	1.700.000	APBD II	12 paket	1.338.000
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota pekalongan	12 paket	85.512.000	APBD II	12 paket	58.370.000,
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota pekalongan	12 paket	2.914.000	APBD II	12 paket	2.677.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota pekalongan	11 paket	55.473.000	APBD II	11 paket	48.191.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota pekalongan	12 paket	13.577.000	APBD II	12 paket	13.387.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota pekalongan	12 dokumen	2.580.000	APBD II	12 dokumen	2.544.000
14	Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota pekalongan	115 orang/kali	275.000.000	APBD II	115 orang/kali	200.796.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	166.406.000	APBD II	100 persen	153.334.000
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	1.362.000	APBD II	12 laporan	1.343.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	75.000.000	APBD II	12 bulan	66.002.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	90.044.000	APBD II	12 bulan	85.989.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	109.900.000	APBD II	100 persen	77.875.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		12 unit	84.700.000	APBD II	12 bulan	57.720.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 unit	25.200.000	APBD II	12 unit	20.155.000
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Kota pekalongan	100 persen	581.954.000	APBD II	100 persen	769.719.000
		Persentase penyediaan data informasi perencanaan tepat waktu		100 persen			100 persen	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu		100 persen			100 persen	
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan		100 persen	489.424.000	APBD II	100 persen	651.184.000
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Pekalongan	5 dokumen	489.424.000	APBD II	5 dokumen	651.184.000
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	Kota Pekalongan	100 persen	17.200.000	APBD II	100 persen	106.532.000
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Pekalongan	1 dokumen	17.200.000	APBD II	1 dokumen	106.532.000
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Kota Pekalongan	100 persen	75.330.000	APBD II	100 persen	12.003.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		8 laporan	75.330.000	APBD II	8 laporan	12.003.000
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud		100 persen	586.389.000	APBD II	100 persen	762.804.000
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian		100 persen			100 persen	
		Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah		100 persen			100 persen	
10	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>187.172.000</i>	<i>APBD II</i>	<i>100 persen</i>	<i>196.592.000</i>
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 laporan	11.000.000	APBD II	1 laporan	8.567.000
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 laporan	45.000.000	APBD II	1 laporan	68.541.000
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 laporan	30.000.000	APBD II	1 laporan	25.701.000,
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembanguna Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		1 laporan	101.172.000	APBD II	1 laporan	93.783.000
11	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>52.657.000</i>	<i>APBD II</i>	<i>100 persen</i>	<i>163.110.000</i>

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 laporan	52.657.000	APBD II	2 laporan	163.110.000
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kota Pekalongan	100 persen	346.560.000	APBD II	100 persen	403.102.000
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2 laporan	167.550.000	APBD II	2 laporan	197.072.000
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		2 laporan	179.010.000	APBD II	2 laporan	206.030.000
B	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				734.855.000	APBD II		1.207.445.000
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	Kota Pekalongan	100 persen	734.855.000	APBD II	100 persen	1.207.445.000
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)						
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan		100 persen			100 persen	
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	Kota Pekalongan	100 persen	267.940.000	APBD II	100 persen	252.582.000
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		5 laporan	173.720.000	APBD II	5 laporan	175.573.000
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 laporan	94.220.000	APBD II	1 laporan	77.009.000
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	Kota Pekalongan	100 persen	313.725.000	APBD II	100 persen	295.859.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosia	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		2 dokumen	313.725.000	APBD II	2 dokumen	295.859.000
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	Kota Pekalongan	100 persen	153.190.000	APBD II	100 persen	659.004.000
33	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		2 dokumen	141.690.000	APBD II	2 dokumen	659.004.000
34	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		1 laporan	11.500.000	APBD II	-	-

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024. Rencana kerja Bappeda Tahun 2024 mengacu kepada RKPD Tahun 2024, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Tahun 2024 mengacu pada permendagri 90 tahun 2019 yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BAPPEDA	7.667.714.000		
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	6.932.859.000		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.764.516.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
			persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.366.000	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100 persen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.972.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.394.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.031.088.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.984.196.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/bulan
5	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	45.600.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	1.292.000,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.756.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	85.512.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.914.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
11	Penyediaan BahanLogistik Kantor	55.473.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.577.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.580.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
14	Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	275.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 laporan
5	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	166.406.000	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.362.000,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.044.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kantor yang Disediakan	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.900.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.700.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.200.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	581.954.000	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen
			Persentase penyediaan data informasi perencanaan tepat waktu	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	489.424.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	489.424.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	5 dokumen
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	17.200.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	17.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	75.330.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.330.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 laporan
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	586.389.000	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	187.172.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.000.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	45.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.172.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)	52.657.000	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.657.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	346.560.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang nfrastruktur	167.550.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 laporan
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	179.010.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan
B	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	734.855.000		

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	734.855.000	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen
13	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	267.940.000	<i>Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan</i>	100 persen
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	173.720.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 laporan
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	94.220.000	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan
14	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	313.725.000	<i>Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial</i>	100 persen
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	313.725.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen
15	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	153.190.000	<i>Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)</i>	100 persen
33	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	141.690.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen
34	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	11.500.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2024 Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, kedua urusan tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dan juga dengan mengacu pada RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 memuat 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari 4 program 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.667.714.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Substansi Renja Bappeda disusun dengan berpedoman Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

5.1 CATATAN PENTING

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang tetap harus dikedepankan.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kerja dan anggaran masing masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Kami berharap, bahwa Renja Bappeda ini dapat mengakomodir seluruh target indikator kinerja untuk urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Pekalongan, 09 Agustus 2023

Kepala Bappeda Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSI